



Deteksi Dini Cegah Sebaran Omicron

■ Pemda DIY Siap Laksanakan PPKM Mikro Selama Nataru

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengantisipasi sebaran varian baru Covid-19, omicron dengan upaya deteksi dini. Setiap dijumpai penularan virus corona cukup masif di permukiman penduduk, eksekutif langsung melaksanakan pemeriksaan secara khusus.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengungkapkan, pihaknya menyadari betul ancaman omicron yang telah tiba di tanah air. Meski sejauh ini belum dijumpai di kota pelajar, Pemkot harus mampu mengantisipasi, agar potensi sebaran bisa terdeteksi.

"Sampai sekarang kita belum menemukan. Tapi, disepakati, pada kelompok masyarakat yang terjadi sebaran cepat, kita periksa secara khusus di laboratorium, di UGM, ini untuk mendeteksi omicron," ungkapnya, Rabu (29/12).

"Jadi, nanti kalau di kawasan itu kami tengarai ada sebaran yang cepat, maka warga langsung kita pehiksa di lab yang ada di UGM itu. Indikatornya sekarang adalah kecepatan penyebaran virusnya di masyarakat," tambahnya.

Oleh sebab itu, Heroe memastikan, jika indikator tersebut ditemukan, maka kontak eratnya tak sebatas menjalani tes swab PCR se-

mata, namun harus diperiksa di laboratorium. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan treatment khusus bagi wilayah dengan tingkat sebaran kilat.

"Otomatis, nanti langsung kita sekat-sekat itu, kalau di sana terindikasi ada omicron. Bagaimanapun, jangan sampai itu menyebar luas kalau sampai ditemukan," tegasnya.

Sehingga, Wakil Wali Kota Yogyakarta tersebut berujar, kebijakan PPKM Mikro yang ditrusrasikan oleh Mendagri selama periode Natal dan tahun baru (nataru) ini, sangat penting guna mengantisipasi penyebaran omicron.

Pemkot juga menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan PPKM Mikro selama periode Natal dan tahun baru (nataru) ini, terutama di tingkat RT dan RW hingga kini masih disisagakan, dan rutin mengirimkan laporannya.

Sebagai informasi, terdapat lima provinsi tujuan wisata, yang ditrusrasikan melaksanakan PPKM Mikro oleh Mendagri. Meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Yogyakarta, serta Lombok. Salah satu poin utama pada kebijakan ini ialah pengaktifan kembali Satgas Covid-19 di wilayah.

Heroe mengatakan, bahwa selama ini pihaknya telah mengulurkan upaya yang selaras dengan aturan PPKM

Mikro. Meski sebaran Covid-19 sudah sangat melandai, pertumbuhan kasus di kampung, atau permukiman penduduk tetap jadi perhatian.

"Kita masih meminta laporan dari masyarakat, terutama posko RT dan RW, mengenai jumlah kasus, yang tumbuh di wilayahnya itu, terang Heroe.

Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta tersebut mengatakan, peran serta posko di wilayah pun makin besar seiring masuknya varian baru corona, omicron, ke Indonesia. Ia pun menegaskan, aktivitas yang melibatkan warga luar daerah harus diminimalisasi selama nataru.

"Makanya, aktivitas-aktivitas sosial hanya untuk orang Yogyakarta dulu sementara. Itu pun harus dapat konfirmasi dulu dari Satgas ke-mantren, kemudian bersama-sama kita evaluasi proses di event itu," paparnya.

Optimalkan posko

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Kadarmanta Baskara Aji menuturkan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengundang seluruh bupati dan walikota untuk menggelar rapat koordinasi. Pada intinya, kabupaten/kota diminta untuk mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 yang telah dibentuk di tingkat provinsi hingga desa atau kalurahan.

TERUS WASPADA

- Pemkot Yogyakarta upayakan deteksi dini mengantisipasi sebaran omicron.
- Setiap dijumpai penularan virus corona cukup masif langsung ada pemeriksaan secara khusus.
- Pemda DIY siap melaksanakan PPKM Mikro selama nataru.
- PHRI DIY menurunkan target okupansi hotel saat libur nataru menjadi 80 persen saja.

"Kami minta kabupaten/kota mengaktifkan kembali posko itu," jelas Aji.

Aji melanjutkan, saat ini tren penularan Covid-19 di DIY tergolong landai. Seluruh kecamatan di wilayah ini pun masuk dalam zona hijau atau kawasan dengan resiko penularan Covid-19 yang rendah. Hanya ada sejumlah desa yang digolongkan memiliki resiko penularan sedang.

"Dan tadi dilaporkan, di level kecamatan semuanya hijau. Kalau di level kalurahan ada 2-3 yang masih kuning. Kalau merah kita nggak ada dan kalau kabupaten semua hijau," bebarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut pemerintah kabupaten/kota juga diminta untuk meninjau ulang Posko Satgas Covid-19 yang belum berjalan optimal. Posko tersebut bertugas untuk mendata warga yang masuk serta melakukan pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan (prokes).

Menurut Aji, meski ada kata *lockdown* dalam kebijakan tersebut, tempat wisata di DI Yogyakarta tetap dizinkan buka secara terbatas. Kebijakan *micro lockdown* hanya menekankan pada pengaktifan kembali Posko Satgas Covid-19 yang dibentuk di tiap daerah. **(akabro)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005